

tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target-target RPJMD yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain untuk peningkatan SDM masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang semakin meningkat kualitasnya, memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan jaringan irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta mengembangkan pasar-pasar dan peningkatan anggaran untuk pembangunan pedesaan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan diwilayah Kabupaten Gunung Mas serta mendukung proses perencanaan bottom Up dari desa, maka disusun Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan/Desa dalam rangka mengakomodir usulan partisipatif dari masyarakat.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas BERSINAR Tahun 2019.

Tabel 7.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2019
Kabupaten Gunung Mas

No.	Uraian	Proyeksi				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	BELANJA					
2.1	Belanja Tidak Langsung	357.935.376.779,15	393.728.914.457,07	433.101.805.902,77	476.411.986.493,05	521.053.185.142,35
2.1.1	Belanja Pegawai	321.432.376.779,15	353.575.614.457,07	388.933.175.902,77	427.826.493.493,05	470.609.142.842,35
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	30.000.000.000	33.000.000.000	36.300.000.000	39.930.000.000	43.923.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	986.000.000	1.084.600.000	1.193.060.000	1.312.366.000	1.443.602.600
2.1.6	Belanja Bagi Hasil					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.017.000.000	5.518.700.000	6.070.570.000	6.677.627.000	7.345.3889.700
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000
2.2	Belanja Langsung	165.284.043.369	174.961.1137.68	188.325.166.957	203.767.006.263	220.595.299.273
2.2.1	Belanja Pegawai	38.677.133.250	42.544.846.575	46.799.331.232,5	51.476.264.355,75	56.627.190.791.33
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.907.724.893	169.572.830.112,8	169.464.084.360,18	187.215.154.101,34	174.912.465.704,34

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b'	B

2.2.3	Belanja Modal	255.699.185.226	262.843.436.780,2	272.061.751.364,32	300.072.587.805,5	299.055.642.779,34

8.1 Program Unggulan Kepala Daerah

Program unggulan kepala daerah disusun berdasarkan janji-janji politik kepala daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. Program unggulan tersebut merupakan penjabaran dari masing-masing misi yaitu sebagai berikut:

A. Pelayanan Pendidikan :

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada berbagai jenjang, di lokasi-lokasi tertentu yang strategis, dalam rangka pemerataan dan kemudahan akses terhadap layanan pendidikan.
2. Mengembangkan sekolah-sekolah unggulan dan sekolah khusus, yang relevan terhadap pasar tenaga kerja.
3. Pendidikan gratis sampai tingkat SMU/SMK yang sudah berjalan selama ini, akan terus dilanjutkan, dalam rangka memantapkan program wajib belajar, yang tidak lagi 9 tahun, tetapi ditingkatkan menjadi menjadi 12 tahun.
4. Penyediaan tenaga pendidik yang professional dan memenuhi standard kualifikasi, pada berbagai jenjang pendidikan (SD, SLTP, SMU dan SMK).
5. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, bagi pelajar dan mahasiswa putra daerah, yang berprestasi tetapi kurang mampu, untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Peningkatan kesejahteraan para tenaga kependidikan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk didalamnya menyangkut Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah dan Tunjangan Daerah Terpensil.

B. Pelayanan Kesehatan :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana, peralatan, tenaga pelayanan kesehatan (termasuk dokter dan paramedis yang sekarang jumlahnya sangat terbatas) dan pengadaan obat-obatan yang semakin memadai, sampai ke daerah-daerah terpencil.
2. Memperluas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat masyarakat kurang mampu secara gratis, baik di Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan lain-lain.
3. Peningkatan kesehatan Ibu dan anak, serta gizi balita.
4. Peningkatan kesadaran pola hidup sehat dalam masyarakat.



5. Peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap bahaya Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

C. Peningkatan Pemberdayaan dan Daya Saing Ekonomi Rakyat :

1. Pengembangan usaha tani menetap dan berkelanjutan lainnya disamping karet, baik di sektor perkebunan, budidaya perikanan, budidaya peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi, khususnya menyangkut aspek manajemen, fasilitasi permodalan dan pemasaran hasil produksinya.

D. Pemantapan Pembangunan Infrastruktur :

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka isolasi daerah.
2. membangun jembatan sosial bagi masyarakat, untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, baik antar desa, antar kecamatan, antar Kabupaten/Kota dan bahkan antar Provinsi.
3. Peningkatan penyediaan sarana air bersih dan sarana telekomunikasi secara merata.

E. Peningkatan Layanan Pemerintahan :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) berupa penataan kewenangan, penataan kelembagaan, penataan personil, penataan pelayanan, dan lebih-lebih lagi persoalan penataan keuangan daerah.
2. Peningkatkan kualitas layanan publik pada semua tingkatan pemerintahan, di Kabupaten Gunung Mas, terutama penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), pada setiap jenis dan tingkatan layanan pemerintahan.
3. Pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan jenjang pendidikan formal aparatur, melalui beasiswa di jenjang pendidikan (S1, S2 dan S3)

F. Peningkatan Penyediaan Energi :

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	H

1. Penyediaan tenaga listrik melalui pembangunan pembangkit dan jaringannya, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat dan PT.PLN Persero, baik dengan memanfaatkan sumber energi yang ada, seperti batu bara, serta memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti tenaga air, tenaga surya, panas bumi, dan lain-lain.
2. Pembangunan SPBU, yang diharapkan harus ada 3-4 SPBU di Kabupaten Gunung Mas, dalam rangka menstabilkan harga BBM dan harga-harga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

G. Penyediaan Lapangan Pekerjaan :

1. Penyediaan lapangan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang investasi;
2. Pembangunan SMK-SMK dan setingkat Politeknik, yang akan mencetak tenaga terampil, yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga lulusan SMK dan Politeknik tersebut, dapat terserap oleh pasar tenaga kerja yang tersedia, sehingga tidak menambah daftar panjang pengangguran intelektual di daerah ini.

H. Peningkatan pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan sumber daya alam:

1. Pemanfaatan sumberdaya alam secara serasi, seimbang dan lestari;
2. Pemanfaatan hutan, pengembangan perkebunan besar, pertambangan (termasuk Pertambangan Tanpa Izin/PETI), kedepan harus benar-benar dapat dikendalikan dengan baik.

8.2 Program Strategis Kabupaten

Program strategis Kabupaten disusun berdasarkan analisis terhadap perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2009-2013. Program strategis ini merupakan strategi untuk menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan Kabupaten Gunung Mas untuk lima tahun kedepan yaitu periode Tahun 2014 - 2019. Program strategis ini dibagi per tahap untuk tiap tahun pembangunan sebagai langkah asal dan tema dari rencana pembangunan tahunan yaitu meliputi :

a. Tahun 2014 :

KABAG HUKUM	KASUBBAG
5	14

Tema : ***Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pencapaian kesejahteraan perekonomian masyarakat :***

1. Peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur;
4. Peningkatan kesempatan lapangan kerja;
5. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;
6. Peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan SKPD;
7. Peningkatan reformasi birokrasi;
8. Pembangunan sistem penanganan bencana;

b. Tahun 2015 :

Tema : ***Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan daya saing daerah serta peningkatan aksesibilitas infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat :***

1. Peningkatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam revitalisasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Peningkatan dan aksesibilitas infrastruktur jembatan dan jalan;
4. Peningkatan kesempatan lapangan kerja;
5. Penekanan angka kemiskinan;
6. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;
7. Peningkatan penerapan SPM dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan SKPD;
8. Pembangunan reformasi birokrasi;
9. Pembangunan sistem penanganan bencana;
10. Meningkatkan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

c. Tahun 2016:

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	W

Tema : ***Lanjutkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan daya saing daerah serta peningkatan aksesibilitas infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat:***

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi pertanian dan pedesaan;
5. Peningkatan infrastruktur;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
11. Program pembangunan berwawasan lingkungan.

d. Tahun 2017 :

Tema : ***Lanjutkan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengembangan daya saing daerah serta peningkatan aksesibilitas infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan rakyat :***

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja;
3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan infrastruktur;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

e. Tahun 2018 :

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	11

Tema : ***Lanjutkan pembangunan di berbagai sektor dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Gunung Mas :***

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja;
3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan infrastruktur;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.
10. Program pembangunansarana air bersih dan sanitasi.

f. Tahun 2019 :

Tema : ***Lanjutkan dan Mantapkan pembangunan di berbagai sektor dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat serta aksesibilitas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat Gunung Mas :***

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;
4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;
6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
7. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya;
8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas wilayah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	My

10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Pelaksanaan program penyelenggaraan Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*out comes*) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan.

Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD. Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing-masing program. Untuk program yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusikan kepada SKPD terkait. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

KAPPAHUKUM	KASUBAG
5	M

No	Program	Indikator Kinerja Program	Sisa Capaian Pelaksanaan Tahun 2014	Tercapai Kinerja Program dan Target Penyerapan										Kendala Kinerja Pelaksanaan		Lampiran PO Pelaksanaan					
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			SPMAD Tahun 2018	Tahun			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.00	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.00	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan	Penerapan sistem keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.00	Peningkatan mutu pelayanan dan kualitas proses layanan	Pelayanan terpadu dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KABAG HUKUM KASUBBAG

f

H

No	Program	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Sebelumnya	Target Kinerja Program dan Pelaksanaan									Kendali Kinerja Pada Awal Periode		Lampiran PO Perencanaan Jangka			
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		2019 BUDJ dan 2019				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdapatnya pelayanan administrasi yang baik dan cepat	13 kegiatan	1.500.000,00 100%, 10 orang, 25 unit, 25 unit	2.619.333.772	174 unit, 12 orang, 12 orang, 27 unit, 10 orang	2.643.168.000	200 unit, 12 orang, 12 orang, 27 unit, 10 orang	21.848.000.000	250 unit, 12 orang, 100%, 1 orang, 25 unit	1.500.000,00	250 unit, 12 orang, 100%, 1 orang, 25 unit	1.115.412.000	250 unit, 12 orang, 100%, 26 orang, 25 unit	2.720.000.000	1.270 unit, 12 orang, 100%, 10 orang, 27 unit, 10 orang, 27 unit	30.24.305.272	Sekretariat Daerah
1.02	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	1 kegiatan	3 unit, 100%, 3 orang, 2 orang, 1 unit	7.314.881.998	1 unit, 100%, 1 orang, 1 orang, 1 unit, 1 orang, 1 unit, 1 orang	104.000.000	100%, 1 unit, 1 orang, 100%	142.000.000	100%, 1 unit, 1 orang, 100%	298.500.000	100%, 1 unit, 1 orang, 100%	144.961.000	100%, 1 unit, 1 orang, 100%	134.650.000	4 unit, 100%, 3 orang, 100%, 1 unit, 100%, 1 unit, 100%	5.995.224.500	Sekretariat Daerah
1.01	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terdapatnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan cepat	1 kegiatan	1 unit, 100%	100.000.000	1 unit, 100%	100.000.000	70 unit	140.000.000	70 unit	23.200.000	1 unit, 100%	100.000.000	100%	91.000.000	1 unit, 100%	1.405.261.000	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	1 kegiatan	10 unit, 100%	400.000.000	10 unit, 100%	400.000.000	20 unit, 100%	200.000.000	20 unit, 100%	11.000.000	20 unit, 100%	100.000.000	20 unit, 100%	70.000.000	10 unit, 100%	2.811.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	1 kegiatan	1 unit, 100%	1.619.000.000	1 unit, 100%	1.619.000.000	1 unit, 100%	1.619.000.000	1 unit, 100%	22.000.000	1 unit, 100%	44.000.000	1 unit, 100%	25.000.000	1 unit, 100%	4.171.800.000	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	1 kegiatan	20 unit, 100%	2.401.750.000	20 unit, 100%	2.401.750.000	20 unit, 100%	2.401.750.000	20 unit, 100%	1.400.000.000	20 unit, 100%	7.818.970.000	20 unit, 100%	7.018.624.000	145 unit, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%	30.177.723.000	Sekretariat Daerah
1.04	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan cepat	1 kegiatan	1 unit, 100%	100.000.000	1 unit, 100%	100.000.000	1 unit, 100%	100.000.000	1 unit, 100%	410.000	1 unit, 100%	410.000	1 unit, 100%	410.000	1 unit, 100%	1.000.000	Sekretariat Daerah
1.05	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan cepat	1 kegiatan	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	1.750.000.000	1 unit, 100%	31.500.000	Sekretariat Daerah
1.06	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan cepat	1 kegiatan	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	21.000.000	1 unit, 100%	500.000	Sekretariat Daerah
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																		
1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terdapatnya pelayanan administrasi yang baik dan cepat	13 kegiatan	100%	5.232.168.568	100%	5.242.181.240	100%	5.251.172.912	100%	5.261.164.584	100%	5.271.156.256	100%	5.281.147.928	100%	28.478.181.108	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.02	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	1 kegiatan	90%	1.011.000.750	90%	1.175.500.750	90%	1.197.230.750	90%	1.243.770.750	90%	1.330.600.750	90%	1.419.530.750	90%	1.401.321.000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.03	Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan cepat	11 kegiatan	90%	5.900.000	90%	6.600.000	90%	6.800.000	90%	7.100.000	90%	7.500.000	90%	7.900.000	90%	414.313.921	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.04	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	11 kegiatan	90%	74.300.000	90%	716.600.000	90%	791.200.000	90%	838.800.000	90%	925.500.000	90%	1.012.100.000	90%	1.020.551.000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.05	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	11 kegiatan	90%	16.202.050	90%	386.917.000	90%	407.770.000	90%	432.631.000	90%	457.492.000	90%	482.353.000	90%	251.482.000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	Program Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran yang baik dan cepat	13 kegiatan	90%	2320.524.600	90%	2.488.716.976	90%	2.741.050.240	90%	3.011.511.256	90%	3.192.204.050	90%	3.373.796.291	90%	1.763.744.410	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABAG HUKUM KASUBBAG

b

u

No	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun Pelaksanaan Program	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembinaan												Capaian Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja / Instansi
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		RPJMD Tahun 2019		
				Target	Ra.	Target	Ra.	Target	Ra.	Target	Ra.	Target	Ra.	Target	Ra.	Target	Ra.	
25.05	Program Pembinaan Desa (binaan?)	jumlah desa binaan yang terdapat di lingkungan Kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang sesuai dengan visi misi Kecamatan dan RPJMD Kabupaten	14 kegiatan	90%	175.20.000	90%	17.370.000	90%	22.050.000	90%	19.270.000	90%	18.875.000	90%	19.270.000	90%	19.570.000	Kecamatan Brehm
25.06	Program Pembinaan Desa (binaan?)	jumlah desa binaan yang terdapat di lingkungan Kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang sesuai dengan visi misi Kecamatan dan RPJMD Kabupaten	14 kegiatan	95%	102.950.000	95%	97.250.000	95%	91.250.000	95%	182.700.300	95%	196.000.100	95%	187.500.000	95%	189.950.000	Kecamatan Tawati
25.07	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	11 kegiatan	95%	6.300.000	95%	6.300.000	95%	6.300.000	95%	6.300.300	95%	6.300.000	95%	6.300.000	95%	6.300.000	Kecamatan Tawati
25.08	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	95%	9.600.000	95%	9.600.000	95%	9.600.000	95%	9.600.000	95%	9.600.000	95%	9.600.000	95%	9.600.000	Kecamatan Tawati
KECAMATAN BUKIT BAYU UTARA																		
25.09	Program Pembinaan Desa (binaan?)	jumlah desa binaan yang terdapat di lingkungan Kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang sesuai dengan visi misi Kecamatan dan RPJMD Kabupaten	14 kegiatan	100%	9.510.000	100%	151.820.000	100%	1.000.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.875.000.000	100%	1.875.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.10	Program Pembinaan Desa (binaan?)	jumlah desa binaan yang terdapat di lingkungan Kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang sesuai dengan visi misi Kecamatan dan RPJMD Kabupaten	14 kegiatan	100%	1.845.000.000	100%	1.995.000.000	100%	1.995.000.000	100%	1.995.000.000	100%	1.995.000.000	100%	1.995.000.000	100%	1.995.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.11	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	32.350.000	100%	47.375.000	100%	32.375.000	100%	32.375.000	100%	32.375.000	100%	32.375.000	100%	32.375.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.12	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	27.800.000	100%	22.500.000	100%	22.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	100%	27.500.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.13	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	3.260.000	100%	8.000.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.14	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	32.270.000	100%	35.200.000	100%	25.100.000	100%	25.220.000	100%	25.220.000	100%	25.220.000	100%	25.220.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.15	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	6.075.000	100%	233.355.000	100%	4.355.500	100%	4.355.500	100%	4.355.500	100%	4.355.500	100%	4.355.500	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.16	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.17	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	17.800.000	100%	21.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.18	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	82.000.000	100%	106.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.19	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	23.800.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
25.20	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	100%	11.000.000	100%	11.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Kecamatan Bukit Bayu Utara
KECAMATAN BUKIT BAYU																		
27.01	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	90%	3.007.700.000	90%	3.284.277.000	90%	3.311.717.000	90%	3.490.271.000	90%	3.580.271.000	90%	3.284.277.000	90%	3.440.277.000	Kecamatan Bukit Bayu
27.02	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	90%	1.261.170.000	90%	119.156.000	90%	1.052.500.000	90%	205.050.000	90%	207.050.000	90%	807.050.000	90%	1.087.716.000	Kecamatan Bukit Bayu
27.03	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	90%	30.550.000	90%	21.000.000	90%	48.000.000	90%	43.000.000	90%	60.000.000	90%	10.000.000	90%	266.330.000	Kecamatan Bukit Bayu
27.04	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	90%	71.100.000	90%	83.000.000	90%	83.000.000	90%	83.000.000	90%	83.000.000	90%	83.000.000	90%	262.500.000	Kecamatan Bukit Bayu
27.05	Program Pengembangan Kegiatan Budaya	jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan	14 kegiatan	90%	1.290.000	90%	8.500.000	90%	3.300.000	90%	9.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	5.200.000	Kecamatan Bukit Bayu

KABAG HUKUM KASUBBAG

f. M.

No	Nama Debitur	Jenis Debitur	Kategori	Status	1/2014		2/2014		3/2014		4/2014		5/2014		6/2014	
					Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo	Jumlah	Saldo
1	Kasihan	Kasihan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
REKAMATI DAN HUKUM KASIHAN					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Kasihan	Kasihan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
REKAMATI DAN HUKUM KASIHAN					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Kasihan	Kasihan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
REKAMATI DAN HUKUM KASIHAN					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Kasihan	Kasihan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
REKAMATI DAN HUKUM KASIHAN					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Kasihan	Kasihan	1	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
REKAMATI DAN HUKUM KASIHAN					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Date Capaian Fisik Tahun Realisasi Perencanaan 2014	Ragat Kinerja Program Berbasis Kinerja												Revisi Kinerja Fisik Akhir Periode		Uraian esis PD yang ditanggung
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		RPJMD tahun 2019		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
31	09 Program Pengelolaan Kemitraan Masyarakat	terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan	31 Agustus	95%	48.000.000	95%	48.000.000	95%	48.000.000	95%	48.000.000	95%	48.000.000	95%	48.000.000	95%	48.000.000	Kecamatan Pangajene Mulu
32	09 Program Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik	1 Agustus	95%	30.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	95%	30.000.000	Kecamatan Pangajene Mulu
33	09 Program Pelaksanaan Pembangunan	terwujudnya pembangunan yang baik	1 Agustus	95%	18.000.000	95%	18.000.000	95%	18.000.000	95%	18.000.000	95%	18.000.000	95%	18.000.000	95%	18.000.000	Kecamatan Pangajene Mulu
34	09 Program Kerja Sama	terwujudnya kerja sama yang baik	1 Agustus	95%	12.000.000	95%	12.000.000	95%	12.000.000	95%	12.000.000	95%	12.000.000	95%	12.000.000	95%	12.000.000	Kecamatan Pangajene Mulu
KECAMATAN MANUHUNG BAYA																		
35	09 Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	terwujudnya pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik	1 Agustus	90%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	100%	9.750.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
36	09 Program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	terwujudnya sarana dan prasarana yang baik	7 Agustus	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.450.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
37	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	2 Agustus	90%	37.300.000	90%	37.300.000	90%	37.300.000	90%	37.300.000	90%	37.300.000	90%	37.300.000	90%	37.300.000	Kecamatan Manuhung Baye
38	09 Program Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	terwujudnya sarana dan prasarana yang baik	1 Agustus	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
39	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	3 Agustus	100%	17.400.000	100%	17.400.000	100%	17.400.000	100%	17.400.000	100%	17.400.000	100%	17.400.000	100%	17.400.000	Kecamatan Manuhung Baye
40	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	7 Agustus	100%	12.875.000	100%	12.875.000	100%	12.875.000	100%	12.875.000	100%	12.875.000	100%	12.875.000	100%	12.875.000	Kecamatan Manuhung Baye
41	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	14 Agustus	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
42	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
43	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	7 Agustus	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
44	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	14 Agustus	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
45	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
46	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	Kecamatan Manuhung Baye
KECAMATAN BUNJANG BARAT																		
47	09 Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	terwujudnya pelaksanaan administrasi pemerintahan yang baik	14 Agustus	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	90%	1.494.575.000	Kecamatan Bunjang Barat
48	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	6 Agustus	95%	375.000.000	95%	375.000.000	95%	375.000.000	95%	375.000.000	95%	375.000.000	95%	375.000.000	95%	375.000.000	Kecamatan Bunjang Barat
49	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	7 Agustus	95%	1.000.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	95%	1.000.000	Kecamatan Bunjang Barat
50	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	95%	33.000.000	95%	33.000.000	95%	33.000.000	95%	33.000.000	95%	33.000.000	95%	33.000.000	95%	33.000.000	Kecamatan Bunjang Barat
51	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	90%	2.200.000	90%	2.200.000	90%	2.200.000	90%	2.200.000	90%	2.200.000	90%	2.200.000	90%	2.200.000	Kecamatan Bunjang Barat
52	09 Program Pelaksanaan	terwujudnya pelaksanaan yang baik	11 Agustus	90%	22.325.000	90%	22.325.000	90%	22.325.000	90%	22.325.000	90%	22.325.000	90%	22.325.000	90%	22.325.000	Kecamatan Bunjang Barat

BAG HUKUM KASUS BAG

f
B